

PENDIDIKAN DI BERANDA TERDEPAN NEGARA PERBATASAN ENTIKONG

Kardius Richi Yosada

STKIP Persada Khatulistiwa, Indonesia

Email: richiyosada78@gmail.com

Abstrak:

Kondisi pendidikan di kawasan perbatasan Entikong sungguh sangat memprihatinkan. Sekolah-sekolah yang ada tidak dibangun dengan pondasi yang kuat sehingga sudah banyak yang rusak dan tidak layak pakai. Kondisi ini sungguh sangat jauh berbeda dengan negeri tetangga Malaysia. Di Malaysia, sekolah-sekolah dibangun dengan baik serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang representatif. Sementara di kawasan perbatasan Entikong tidak ditemukan kondisi seperti itu, sehingga tidak mengherankan jika banyak warga masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan Entikong memilih sekolah di Serawak ketimbang sekolah di negeri sendiri. Peningkatan kualitas pendidikan di kawasan perbatasan Entikong merupakan suatu langkah penting dan mendesak untuk mengokohkan sistem pertahanan nasional di beranda terdepan negara melalui pendidikan dan budaya. Peningkatan pendidikan di kawasan perbatasan Entikong dapat menghapus stigma kesenjangan politik nasional mengenai peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur serta menjadikan warga masyarakat di kawasan perbatasan merasa menjadi bagian penting dari negara kesatuan republik Indonesia. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan pendidikan dan meningkatkan kualitas guru serta prestasi siswa.

Kata Kunci: Pendidikan, Beranda Terdepan Negara, Entikong

PENDAHULUAN

Ironis, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi pendidikan di kawasan perbatasan Entikong. Betapa tidak, ketimpangan kualitas pendidikan di kota-kota besar dengan di kawasan perbatasan Entikong yang notabene adalah sebuah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Tebedu Serawak Malaysia sudah terjadi sedemikian rupa, sehingga cerita tentang sekolah rubuh dan tidak layak pakai atau cerita tentang guru yang lari ke negara tetangga Malaysia bukan sekedar mitos belaka. Jika sekilas kita melihat pada sekolah-sekolah unggulan yang ada di kota-kota besar, mungkin kita bisa berbangga dengan kondisi pendidikan kita saat ini. Sekolah-sekolah tersebut sudah sangat mapan dalam hal fasilitas dan kualitas. Guru-guru dan para siswa dari sekolah-sekolah unggulan tersebut selalu dimanjakan dengan fasilitas pendidikan yang lengkap dan mutakhir. Proses pembelajaran dijalankan dengan nyaman dan mudah, sehingga dapat menghasilkan siswa yang berkualitas. Namun, ketika kita melihat kondisi pendidikan di kawasan perbatasan Entikong, keadaan tersebut sungguh berbanding terbalik.

Kondisi pendidikan anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan Entikong sangat paradoks dengan gemerlapnya pendidikan di kota-kota besar. Di saat siswa di sekolah-sekolah perkotaan asyik disuguhkan oleh ruang kelas yang serba mewah, pendidikan di kawasan perbatasan Entikong hanya mampu menyediakan fasilitas yang jauh dari kata cukup. Di saat siswa di sekolah-sekolah perkotaan dimanjakan oleh berbagai

kemudahan akses fasilitas pendidikan, siswa di kawasan perbatasan Entikong masih saja berkutat dengan buku-buku usang yang tidak layak baca.

Tidak banyak yang mengetahui atau peduli dengan nasib pendidikan anak-anak di kawasan perbatasan Entikong. banyak anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan Entikong yang bernasib malang karena tidak dapat memperoleh pendidikan yang bermutu. Di beberapa dusun yang ada di kawasan perbatasan Entikong, anak-anak harus berjalan kaki 1-2 jam sejauh hingga 6 KM dengan melintasi hutan dan menuruni bukit untuk mendapatkan pendidikan di sekolah setiap hari. Belum lagi ditambah penantian 1-2 jam harus menunggu di depan pintu kelas sampai guru mereka tiba di sekolah, bahkan tidak jarang materi pelajaran yang mereka harapkan pupus lantaran guru tidak masuk mengajar.

Potret umum para siswa di kawasan perbatasan Entikong memang sangat memprihatinkan. Namun, nasib para gurunya pun tidak kalah memprihatinkan, terutama para guru honorer yang kebanyakan honor komite. Para guru tersebut banyak yang harus mengajar 2-3 kelas sekaligus. Hal ini terjadi karena kekurangan tenaga guru di sekolah-sekolah pedalaman. Guru yang hanya bergaji antara 100.000-400.000 sebulan itu banyak yang bekerja ekstra ketimbang guru yang berstatus PNS yang meskipun selama satu bulan tidak mengajar di sekolah masih tetap menerima gaji.

Berbagai kondisi pendidikan yang ada di sekitar kawasan perbatasan Entikong tersebut diperparah dengan aksesibilitas menuju ke sekolah yang buruk, sehingga menghambat guru maupun siswa. Mereka harus menyeberangi sungai untuk dapat tiba di sekolah. Butuh waktu lama dan tenaga ekstra karena harus melewati medan yang sulit dan jauh. Selain itu, tenaga pengajar juga terbatas karena tidak banyak yang mau mengabdikan diri sebagai guru di daerah terpencil dengan akses yang sulit dan gaji yang kurang memadai. Pada beberapa contoh kasus misalnya, guru yang mengajar di desa Suruh Tembawang yang berjarak 42 KM dari pusat Kecamatan Entikong dan 187 KM dari ibu kota Kabupaten Sanggau, untuk mengambil gaji di kota kecamatan, biaya yang harus dikeluarkan antara 800.000-1.000.000, sama dan bahkan lebih besar dari nominal gaji yang guru tersebut terima, sehingga guru tersebut memutuskan untuk mengambil gajinya beberapa bulan sekali (Profil Kecamatan Entikong, 2014).

Potret buram pendidikan di kawasan perbatasan Entikong bukanlah hal yang baru. Beranda terdepan negara seolah-olah menjadi pagar dalam menjaga kedaulatan bangsa dan sekaligus gudang keterbelakangan dalam pembangunan nasional, termasuk bidang pendidikan. Ketimpangan pendidikan dengan negara tetangga Malaysia merupakan faktor utama penyebab anak-anak usia sekolah lebih memilih untuk menimba ilmu di negara tetangga tersebut. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, tenaga guru yang berkualitas, biaya pendidikan yang gratis, banyak sekolah yang dilengkapi dengan asrama, termasuk seragam dan buku-buku penunjang sampai jaminan kerja bagi anak-anak Indonesia yang berprestasi. Hal ini menjadi magnet bagi mereka yang berharap untuk memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik dan layak. Hal yang jauh lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa banyak siswa yang tinggal di sekitar kawasan

perbatasan Entikong menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk menuju sekolah milik pemerintahan Malaysia. Jadi, yang seharusnya para siswa pada setiap hari senin melakukan upacara bendera dengan mengibarkan merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya, namun mereka harus pasrah untuk hormat terhadap bendera Malaysia dan mengumandangkan lagu Kebangsaan Malaysia.

Berbagai kebijakan pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya sejak era kemerdekaan sampai pada saat ini masih cenderung bersifat sentralistis. Pemekaran dan otonomi daerah dianggap belum mampu memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi banyak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan Entikong, sehingga tidak mengherankan bila rasa nasionalisme mereka kian hari kian memudar akibat kekecewaan terhadap adanya kesenjangan di berbagai bidang yang semakin melebar. Di antara banyak kesenjangan pembangunan nasional tersebut, pembangunan di bidang pendidikan sampai pada saat ini masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Tampaknya sila ke-5 dari Pancasila yang berbunyi “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan Pembukaan UUD 1945 yang mengamanahkan “bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak bagi kemanusiaan” tetap menjadi simbol dan cita-cita semu belaka.

Berbagai persoalan pendidikan yang ada di kawasan perbatasan Entikong tersebut, tentunya tidak terlepas dari buruknya pengelolaan sistem pendidikan nasional. Tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah juga dituding menjadi faktor penyebab pendidikan di kawasan perbatasan Entikong sampai saat ini menjadi nokta hitam dalam 70 tahun kemerdekaan Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan di Perbatasan Entikong

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Sebagai manifestasi dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah menggratiskan biaya sekolah dan melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Pada kenyataannya wacana pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan tersebut belum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Penyelenggaraan pendidikan tidak merata, penggratisan dan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun lebih tampak di tempat tertentu saja.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa selain memiliki hak, warga negara juga mempunyai kewajiban, salah satu di antaranya adalah kewajiban untuk membela kedaulatan negara. Namun, ketika pemerintah tidak dapat memenuhi hak-hak warga

negara, maka warga negara tersebut cenderung untuk mengabaikan kewajibannya. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan Entikong dengan masyarakat di negara tetangga Malaysia akan mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif terhadap pengamanan di kawasan perbatasan dan rasa nasionalisme. Inilah dampak buruk yang terjadi apabila pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan Entikong diabaikan, karena akan mengikis rasa nasionalisme dan bukan tidak mungkin akan mengancam kedaulatan bangsa.

a. Kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan

Pembelajaran merupakan titik sentral dari sebuah proses pendidikan dan keberadaan guru juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Sebuah hal yang telah disadari lama oleh para penentu kebijakan di negara ini adalah ketersediaan tenaga guru yang masih jauh dari memadai, terutama bagi kawasan perbatasan Entikong. Di kawasan perbatasan Entikong itu sendiri, seringkali jumlah tenaga pengajar tetap hanya 1-2 orang saja, sehingga sangat dibutuhkan tenaga honorer atau tenaga kontrak untuk mencukupi kebutuhan guru yang kurang tersebut.

Permasalahan pendidikan di kawasan perbatasan Entikong begitu pelik, terutama yang menyangkut ketersediaan tenaga pengajar/guru. Banyak guru yang enggan untuk mengajar di kawasan perbatasan Entikong yang notabene adalah kawasan daerah terpencil dan tertinggal. Seringkali mereka hanya bertahan selama beberapa tahun saja, setelah itu mengajukan pindah dengan berbagai macam alasan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa guru di daerah kawasan perbatasan Entikong seringkali kurang, sementara di daerah perkotaan terjadi penumpukan guru. Disamping itu, mutu dan kualitas pembelajaran juga sangat kurang karena banyak guru yang mengajar tidak pada kompetensinya.

Sementara itu, ada beberapa SD di kawasan perbatasan Entikong yang tenaga pengajarnya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang bertugas di kawasan perbatasan tersebut. Sedangkan pengajar yang benar-benar latar belakangnya seorang guru tidak ada satupun yang berada ditempat. Sungguh keadaan seperti ini sangat menyedihkan, mendengar kata anak-anak di kawasan perbatasan Entikong kurangnya mendapatkan pendidikan di usia layaknya seorang anak sekolah (Darmadi, 2013).

Tabel 1
Jumlah Tenaga Guru di Kecamatan Entikong

No	Desa	TK	SD	Ibtidaiyah	SLTP	SMK
1	Entikong	6	28	9	3	35
2	Semanget	3	17	-	22	-
3	Nekan	-	16	-	-	-
4	Pala Pasang	-	7	-	-	-
5	Suruh Tembawang	-	27	-	3	-
Jumlah		9	95	9	28	35

Sumber: Profil Kecamatan Entikong, 2014

b. Rendahnya kesejahteraan guru

Rendahnya kesejahteraan guru yang mengajar di kawasan perbatasan Entikong berpengaruh terhadap rendahnya kualitas pendidikan. Dengan pendapatan yang rendah, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Adanya tunjangan profesi dan khusus daerah perbatasan Entikong sampai pada saat ini masih bias dan tidak jelas. Keterbatasan anggaran adalah jawaban yang seringkali hanya dapat diterima dengan lapang dada oleh para guru yang mengajar di kawasan perbatasan Entikong (Pandi, 2013)

Disamping itu, masalah kesejahteraan dan biaya hidup yang tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah gaji yang para guru terima, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak mau mengajar atau ditempatkan di kawasan perbatasan Entikong. Bayangkan saja, gaji guru baru golongan III/a berkisar 1,7-2 juta rupiah/bulan. Besaran gaji tersebut sangatlah kecil bila dibandingkan dengan besarnya pengeluaran yang mereka butuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai contoh misalnya, guru yang mengajar di desa Suruh Tembawang yang berjarak 42 KM dari pusat Kecamatan Entikong, ketika mengambil gaji ke pusat kecamatan harus mengeluarkan biaya antara 800.000-1.000.000 rupiah dengan transportasi air. Untuk di desa Nekan saja yang hanya berjarak 13,5 KM dari pusat Kecamatan Entikong, harga premium sudah mencapai 15.000/liter, belum lagi ditambah pengeluaran dan biaya hidup lainnya, sehingga banyak guru yang mengambil gaji beberapa bulan sekali lantaran mahal biaya transportasi menuju pusat Kecamatan Entikong (Profil Kecamatan Entikong, 2014).

c. Minimnya fasilitas dan sarana prasarana fisik

Tersedianya fasilitas dan sarana prasarana fisik pendidikan merupakan salah satu parameter penunjang bagi proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pendidikan. Sayangnya, perhatian pemerintah terhadap fasilitas dan sarana prasarana fisik pendidikan di kawasan perbatasan Entikong sampai pada saat ini masih jauh dari yang diharapkan, terlebih lagi bagi sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kota Kecamatan Entikong. permasalahan tersebut penting untuk ditangani secara lebih serius karena sangat berpengaruh terhadap kelancaran dalam proses belajar mengajar.

Masalah minimnya fasilitas dan sarana prasarana pendidikan di kawasan perbatasan Entikong perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Banyak anak-anak yang pergi ke sekolah harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk sampai di sekolah. Jalan yang mereka tempuh untuk bisa sampai di sekolah bukanlah jalan yang mulus melainkan jalan tikus yang berliku-liku dan naik turun bukit, dimana disana juga terdapat binatang buas dan ular berbisa, semuanya itu tidak pernah mereka peduli hanya karena ingin mengejar pendidikan. Bukan karena kemauan mereka berjalan dalam alam seperti itu, tetapi karena belum ada campur tangan pemerintah untuk merubah keadaan tersebut.

Pendidikan di kawasan perbatasan Entikong sangat tidak layak, sehingga kebanyakan siswa lebih memilih sekolah di negeri Serawak Malaysia ketimbang sekolah

di negeri sendiri, alasannya sangat relevan dan logis. Sekolah di Malaysia tidak dipungut biaya sampai tamat, sedangkan sekolah di Indonesia yang iklannya gratis itu hanya usapan jempol belaka. Kemudian sekolah di Malaysia dilengkapi fasilitas dan sarana prasarana penunjang pendidikan yang sangat baik dan gedung sekolahnya pun jauh lebih bagus dari gedung sekolah yang kita miliki, tenaga pengajar (guru) di Malaysia jauh lebih baik dan berdedikasi tinggi daripada tenaga pengajar (guru) yang kita miliki.

Fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang ada di kawasan perbatasan Entikong tidak layak pakai, banyak sekolah yang sudah rusak dan sudah belasan tahun tidak diperbaiki, fasilitas sekolah tidak ada, jarak jauh, kondisi jalan rusak dan becek dan banyak melewati jalan setapak. Sementara sekolah di Malaysia fasilitas dan sarana prasarana pendidikan sangat bagus, fasilitas sekolah lengkap, ada asrama untuk siswa dari Indonesia, infrastruktur jalan sudah bagus dan transportasi murah, mudah dan nyaman serta kualitas pendidikan di Malaysia jauh lebih baik (Andani, 2014).

Sebagai contoh misalnya, ada seorang ibu di desa Pala Pasang Kecamatan Entikong, ahad (8/10) mengatakan, dua dari anaknya bersekolah di Serawak Malaysia. Sekolah di Malaysia gratis, siswa pun justru mendapat uang saku 300 ringgit per bulan yang diberikan tiap tiga bulan sekali. Mereka juga tinggal di asrama, makan dan perlengkapan sekolah semua disediakan. Ibu tersebut menambahkan ketika anak berusia 15 tahun, maka akan ada kartu tanda penduduk Malaysia. Jika siswa sudah tamat sekolah lanjutan atas, siswa tersebut dapat bekerja di Malaysia (Republika, 2013).

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kalbar Alexius Akim mengakui, fasilitas dan sarana prasarana pendidikan di kawasan perbatasan Entikong masih jauh dari harapan. Seharusnya kawasan perbatasan Entikong sebagai beranda terdepan negara juga mempunyai fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang memadai termasuk dari program pendidikan gratis dengan diberikannya bantuan operasional sekolah (BOS) bagi masyarakat yang tidak mampu. Hingga saat ini, permasalahan fasilitas dan sarana prasarana infrastruktur pendidikan masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian yang serius terkait permasalahan tersebut (Hamid, 2013).

Tabel 2
Jumlah Prasarana Pendidikan di Kecamatan Entikong

No	Desa	TK	SD	Ibtidaiyah	SLTP	SMK
1	Entikong	2	4	1	2	2
2	Semanget	1	2	-	1	-
3	Nekan	-	3	-	-	-
4	Pala Pasang	-	3	-	-	-
5	Suruh Tembawang	-	6	-	1	-
Jumlah		3	18	1	4	2

Sumber: Profil Kecamatan Entikong, 2014

d. Kurangnya kesempatan pemerataan pendidikan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan agar terbentuk manusia Indonesia seutuhnya, tertanam pada setiap diri manusia Indonesia insan yang paripurna jasmani dan rohani.

Oleh karena itu, seharusnya sistem pendidikan nasional mampu menyediakan kesempatan pemerataan pendidikan bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan Entikong. Kenyataannya, sampai pada saat ini kesempatan untuk memperoleh pendidikan tersebut masih sebatas pada tingkat sekolah dasar saja. Untuk sekolah menengah (SLTP dan SMK) jumlah sekolahnya masih sangat kurang dan bahkan tidak jarang letak sekolah tersebut sangat jauh untuk dapat dijangkau oleh siswa. Sementara itu, untuk sekolah menengah atas (SMA) sampai saat ini belum ada satupun yang dibangun di kawasan perbatasan Kecamatan Entikong.

e. Budaya pendidikan masih rendah

Sepanjang kawasan perbatasan Kecamatan Entikong, kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan masih sangat rendah. Mereka lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Faktor sosial yang berkaitan dengan kultur masyarakat, baik yang berupa pandangan, adat istiadat dan kebiasaan lainnya yang melekat di dalam suatu kelompok masyarakat, seringkali menjadi faktor penghambat bagi anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak para orang tua siswa yang lebih memilih untuk memperkerjakan anak-anak usia sekolah guna membantu kehidupan ekonomi keluarga. Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan di kawasan perbatasan Entikong tentu sangat membutuhkan sebuah upaya yang dapat memperluas akses masyarakat agar dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

Faktor-faktor seperti kondisi sosial-budaya, ekonomi, demografis dan geografis menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan pada berbagai desa dan dusun yang ada di kawasan perbatasan Kecamatan Entikong. kondisi usia anak-anak yang tidak lagi berada pada usia sekolah juga menjadi resistensi (penghambat) terhadap upaya-upaya pemerintah dalam mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Dampak negatif terhadap keberadaan perbatasan (resiko sebagai warga perbatasan), terutama secara sosial-ekonomi sangat mempengaruhi upaya-paya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam memajukan pendidikan dan sumber daya manusia di kawasan perbatasan Entikong (Pandi, 2013).

Dampak negatif tersebut, misalnya bahwa lulusan sekolah dasar atau yang putus sekolah dasar lebih tertarik untuk pergi ke Malaysia dan menjadi buruh kasar di sektor informal, baik secara legal maupun ilegal. Dengan bekerja mereka dapat memperoleh penghasilan secara langsung. Mereka lebih tertarik dengan kegiatan atau pekerjaan yang

berkaitan langsung secara ekonomi daripada pergi ke sekolah atau melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

2. Solusi Bagi Pendidikan di Kawasan Perbatasan Kecamatan Entikong

Masalah pendidikan di kawasan perbatasan Entikong telah lama disadari, namun dengan dalih keterbatasan dana selalu menjadi alasan untuk menunda pemecahan masalah pendidikan tersebut. Sebagai ilustrasi, bahwa betapa sulitnya menempatkan tenaga guru di kawasan perbatasan Entikong, demikian pula sulitnya untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan standar karena kesulitan komunikasi atau langkahnya alat-alat bantu dalam proses belajar mengajar. Begitu pula dengan tuntutan sistem pendidikan yang standar mengenai jenjang pendidikan serta kurikulum nasional merupakan merupakan penghambat daerah kawasan perbatasan Entikong untuk mengejar ketertinggalan.

Program pemerintah dengan menempatkan pengajar-pengajar muda yang tergabung dalam program kegiatan “SM3T” dan “Indonesia Mengajar” perlu untuk ditingkatkan. Hal ini mengingat kebutuhan guru di kawasan perbatasan Entikong sangat mendesak. Namun, perlu diingat bahwa program seperti ini hanyalah program jangka pendek untuk mengatasi kekurangan guru dan tetap memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang tinggal di kawasan perbatasan Entikong untuk tetap dapat mengenyam pendidikan. Disamping itu, peningkatan rekrutmen tenaga guru dapat dilakukan secara berkala untuk di tempatkan di sekitar kawasan perbatasan Entikong. kegiatan rekrutmen tersebut sebaiknya mempertimbangkan daerah asal calon guru yang akan diangkat menjadi guru tetap. Alasan utamanya adalah karena calon guru tersebut berasal dari daerah dimana mereka di tempatkan, akan dapat meminimalisir kemungkinan pindah tugas seperti yang lazim dilakukan oleh para guru selama ini dengan berbagai alasan (Pandi, 2013).

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru, pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dapat meningkatkan kerja sama dengan LPTK-LPTK di daerah dalam bentuk pemberian beasiswa kepada calon-calon mahasiswa asli daerah yang bersedia ditempatkan di sekitar kawasan perbatasan Entikong. Program ini dapat dilaksanakan dengan melakukan pemetaan kebutuhan guru di kawasan perbatasan Entikong, untuk kemudian menyaring siswa-siswa berprestasi guna diberikan beasiswa. Harapannya adalah ketika mereka telah menyelesaikan studi, mereka dapat membangun kembali daerah mereka dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini juga dapat mengurangi resiko bagi guru-guru yang akan diangkat untuk tidak meninggalkan tugas mereka, karena guru-guru yang ditempatkan adalah guru-guru yang berasal dari daerah tersebut.

Selain pemenuhan kebutuhan guru, hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai kesejahteraan guru. Perlu adanya insentif dan tunjangan khusus yang diberikan bagi guru-guru yang mengajar di kawasan perbatasan Entikong agar kesejahteraan para guru meningkat dan dapat mengurangi kecemburuan sosial terhadap guru-guru yang mengajar di perkotaan. Peningkatan kesejahteraan guru-guru tersebut tidak hanya ditujukan kepada guru-guru tetap saja, namun juga harus diberikan kepada guru-guru

honor dan guru-guru kontrak sesuai dengan kemampuan daerah dan pusat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penataan database guru-guru yang mengajar dan berada di kawasan perbatasan Entikong. Database guru menjadi hal yang sangat penting, mengingat berbagai tunjangan dan insentif yang diberikan seringkali menggunakan sumber dari database yang umumnya dilakukan oleh LPMP. Kesenjangan dan ketidakadilan bagi guru-guru yang mengajar di kawasan perbatasan Entikong dapat diminimalisir dengan akurasi data yang sesuai. Selain itu dapat digalakkan kembali sistem rolling mengajar/pindah tugas yang apabila dimungkinkan dapat dilakukan setiap 5 atau 10 tahun sekali.

Pembangunan fasilitas dan sarana prasarana fisik sekolah yang memadai dan juga menjadi salah satu fokus yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di kawasan perbatasan Entikong. proses pembangunan sarana dan prasarana fisik sekolah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan dana pemerintah, baik dana pemerintah pusat maupun dana pemerintah daerah. Namun, dapat juga menggunakan dana CSR dari berbagai perusahaan yang ada di kawasan perbatasan Entikong. Pembangunan infrastruktur yang mendukung berkembangnya kawasan perbatasan Entikong juga harus didorong seperti infrastruktur jalan, sarana kesehatan dan lain sebagainya, agar mempermudah bagi siswa dan guru dalam memajukan pendidikan di kawasan perbatasan Entikong sebagai beranda terdepan negara.

Solusi terakhir yang dapat ditawarkan adalah peningkatan pengawasan yang menyeluruh terhadap kinerja guru-guru yang mengajar di berbagai sekolah dari berbagai jenjang di kawasan perbatasan Entikong. pengawas sekolah, komite sekolah dan dewan pendidikan harus terus menerus mengevaluasi kinerja guru yang mengajar di kawasan perbatasan Entikong. masyarakat juga perlu didorong untuk dapat terlibat aktif dalam pembangunan pendidikan, sehingga muncul sebuah kesadaran bersama tentang nilai pentingnya pendidikan yang bermuara kepada meningkatnya angka partisipasi pendidikan di kawasan perbatasan Entikong.

SIMPULAN

Mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun kenyataan di lapangan, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia, sementara sebagian besar lainnya masih belum mendapatkan hak pendidikan tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan antar negara di Kecamatan Entikong. Berbagai faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di kawasan perbatasan Entikong seperti kurangnya tenaga guru, minimnya fasilitas dan sarana prasarana, maupun rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan turut andil dalam menciptakan jurang pemisah dengan kondisi pendidikan di perkotaan. Berbagai upaya harus segera ditempuh guna meminimalisir jurang pemisah tersebut antara lain misalnya, penambahan jumlah guru, pengadaan fasilitas dan sarana prasarana sekolah, memperjelas regulasi dan kewenangan

antara pemerintah pusat dan daerah maupun adanya usaha dan kegiatan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Sudah saatnya dan selayaknya pendidikan di kawasan perbatasan Entikong mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak agar stigma kawasan perbatasan Entikong sebagai beranda terdepan negara dalam menjaga keutuhan NKRI justru menjadi tembok keterbelakangan di bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. 2013. *Potret Pendidikan di Daerah Perbatasan: Terdepan Sekaligus Terbelakang*. <https://pandifkipuntan.wordpress.com/>
- Andani, A, 2014. *Peningkatan Kapasitas Generasi Perbatasan Kalimantan Barat Melalui Fokus Pendidikan dan Jiwa Sang Pemimpi*. <http://mudazine.com/>
- Andani, A. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat: Selamatkan Mimpi Anak Perbatasan*. <http://www.change.org/>
- Darmadi, H. 2013. *Pendidikan di Perbatasan Membangun Ketahanan Peradaban Negara Bangsa*. <http://hamiddarmadi.blogspot.co.id/>
- Entikong. 2014. *Profil Kecamatan Entikong*.
- Mulyadi, A. 2013. *Potret Pendidikan*. <http://adimulyadi.023.blogspot.co.id/>
- Prihatini, D. 2015. *Potret Pendidikan Daerah Perbatasan*. <http://news.okezone.com/>
- Republika. 2013. *Warga Perbatasan Kalbar Pilih Sekolahkan Anak di Malaysia*. <http://nasional.republika.co.id/>
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.